

Original Article<sup>\*</sup>)

**Hubungan Antara Persepsi, Pendapatan, Dan Jarak Tempuh Menuju Tempat  
Pembayaran Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Segmen Peserta Bukan Penerima  
Upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor Tahun 2021**

*(The Relationship Between Perception, Income, and Mileage Towards the Place of Payment with Compliance in  
Paying Contributions for the Non-Wage Recipient Participant Segment (NWRP) at Hospital X Bogor Regency in  
2021)*

**Siti Aisah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Indonesia Maju

Email correspondent: 22sitaisah@gmail.com

---

**Abstract**

**Introduction:** Compliance with paying contributions for the National Health Insurance (NHI) is the behavior of a person who is willing to pay contributions in a timely manner based on a predetermined time. Data in 2019 in Indonesia about 13,000 people (40%) of all participants are independent, and irregular in paying monthly dues, while in West Java in 2020 due to non-compliance with participants in paying dues it is known that there are arrears of Rp. 9,692,376,120 or as many as 9,994 independent participants who have been in arrears for more than 6 months, for the Bogor Regency area in 2020 there are still 13.94% non-compliance in making dues payments.

**Methods:** This research used a quantitative research method with a cross-sectional design. The population in this study were all the Non-Wage Recipient Participant Segment (NWRP) registered at Hospital X Bogor Regency in 2021, totaling 2,621 participants and as many as 132 respondents as samples. The study was carried out from November 2021-January 2022. Data analysis was carried out univariate and bivariate using Chi-Square analysis.

**Results:** From the analysis results show that there was a relationship between perception (p-value = 0.002 and OR = 3,353), income (p-value = 0.006 and OR = 2,848), and the distance to the place of payment of contributions (p-value = 0.017 and OR = 2,532). with compliance with paying NHI contributions at Hospital X Bogor Regency in 2021.

**Discussion:** All independent and dependent variables were known to have a relationship, starting from public perception, health insurance participants who had a positive perception of health care places would increase their regularity in paying contributions. As well as insufficient income due to an increase in contributions, so that in order to continue to obtain health services and efforts to fulfill the obligation to pay contributions, many people change BPJS classes. The distance to the place of payment of NHI contributions, even though BPJS has collaborated online, there were participants who paid directly due to participants' ignorance of technology and the average age of participants is above 40 years.

**Keywords:** payment compliance, distance, perception, revenue, national health insurance

**Artikel**

Disubmit (Received) : 16 April 2022

Diterima (Accepted) : 14 May 2022

Diterbitkan (Published) : 14 May 2022

**Copyright: © 2022 by the authors. License DPOAJ, Jakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)**

## Pendahuluan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Kepesertaan yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan, sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta Jaminan Kesehatan. Peserta membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Iuran untuk peserta non PBI yang mulai diberlakukan dari tanggal 1 Januari 2020 dibagi atas tiga jenis yaitu: iuran sebesar Rp.25.500 per orang /bulan untuk ruang perawatan kelas tiga, iuran sebesar Rp.51.000 per orang/bulan untuk ruang perawatan kelas dua dan iuran sebesar Rp.80.000 per orang/bulan untuk ruang perawatan kelas satu.<sup>3</sup> Berdasarkan Perpres RI No 12 tahun 2013, bagi peserta JKN kategori pekerja mandiri wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.<sup>4</sup>

Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Menurut data dari BPJS Kesehatan tahun 2019 sekitar 13.000 jiwa (40%) dari seluruh peserta mandiri, tidak teratur dalam membayar iuran bulanan. Akibatnya sekitar 3 miliar rupiah uang iuran bulanan tidak terbayar. Padahal, total pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta yang sakit, sebelas kali lipat lebih besar dari angka pemasukan yang diterima dari premi peserta mandiri. Komponen terpenting untuk memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri. Pembayaran iuran setiap bulannya maksimal tanggal 10. Peserta yang terlambat dalam melakukan pemnayaran status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan dedenda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan setiap bulan yang tertunggak.<sup>3</sup> Ketidakpatuhan dalam pembayaran premi lebih didominasi oleh peserta mandiri atau biasa disebut Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dan komitmen terhadap kepesertaan sebagai filosofi BPJS Kesehatan sebagaimana tercantum dalam UU BPJS yaitu, kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2018) diketahui bahwa kepatuhan individu dalam melakukan pembayaran iuran di pengaruhi oleh persepsi terhadap pelayanan kesehatan akan mempengaruhi seseorang terhadap biaya pelayanan kesehatan, dimana persepsi ini juga dipengaruhi dari pengalaman, proses belajar, wawasan dan pemikirannya.<sup>6</sup> Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2017) terdapat beberapa faktor yang memiliki hubungan dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri yaitu pendapatan, mutu pelayanan dan kemampuan membayar iuran.<sup>7</sup> Selain persepsi pendapatan seseorang/kelompok memegang peran penting akan tingginya kesadaran individu terhadap kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), semakin tinggi atau besar pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi atau kemauan membayar iuran untuk nanti digunakan kala sakit.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian Dong et al., (2017) meneliti kepatuhan membayar iuran dengan menggunakan variabel jarak ke fasilitas kesehatan. Hasil penelitiannya responden yang memiliki jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan memiliki hubungan yang negatif terhadap kepatuhan membayar iuran individu maupun kepatuhan membayar iuran per capita.<sup>9</sup>

Di Jawa Barat menurut data updating program JKN-KIS kedeputian wilayah Jawa Barat tahun 2020 karena tidak patuhnya peserta dalam membayar iuran diketahui bahwa terjadi tunggakan sebesar Rp. 9.692.376.120 atau sebanyak 9.994 peserta PBPU yang sudah menunggak lebih dari 6 bulan.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor sudah 86,06% sudah patuh dalam melakukan pembayaran iuran BPJS.<sup>10</sup>

Data yang didapat dari Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2020 jumlah peserta yang tidak patuh dalam membayar iuran sebelum tanggal 10 disetiap bulannya dalam masa pandemi COVID-19 adalah 200 peserta kurun waktu 3 bulan dan angka ini lebih tinggi dari data tahun sebelumnya. Adapun dampak dari ketidakpatuhan dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional yaitu tidak adanya asuransi yg menjamin kesehatan setiap individu serta terjadinya penonaktifan status kepesertaan yang membuat peserta tidak mendapat pelayanan kesehatan, dan terjadinya penurunan kunjungan peserta JKN di lokasi dikarenakan status peserta yg sudah tidak aktif lagi karena tidak membayar iuran tepat waktunya. Begitu pun dampak kenaikan iuran menjadi permasalahan pada setiap peserta jaminan kesehatan nasional yaitu peserta akan pindah ke kelas yg lebih rendah seiring dengan kemampuannya dalam membayar iuran dan calon peserta enggan mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan.<sup>3</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan mewawancarai 10 peserta bukan penerima upah (PBPU) dalam pembayaran iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor diketahui 40% sudah patuh dalam melakukan pembayaran iuran, 30% tidak patuh karena memiliki persepsi buruk dalam melakukan pembayaran iuran, 10% tidak patuh membayar iuran karena jarak ke fasilitas kesehatan yang jauh, dan 20% tidak patuh karena pendapatan keluarga masih belum cukup untuk melakukan pembayaran iuran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi, pendapatan, dan jarak tempuh menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hubungan antar variabel dan menjelaskan hubungan yang ditemukan.<sup>11</sup> Metode yang digunakan adalah *non-experiment* dengan *cross-sectional*. *Cross-sectional* yaitu variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada obyek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengkorelasikan persepsi, pendapatan, dan jarak tempuh menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi seluruh peserta PBPU yang terdaftar di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor pada tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 2.621 peserta. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yang telah dihitung dengan menggunakan rumus *Stanley Lameshow*, dengan hasil perhitungan didapatkan 132 responden.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan berupa analisis univariat serta analisis bivariat. Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan distribusi setiap variabel penelitian serta akan menghasilkan distribusi frekuensi serta persentase dari setiap variabel. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menjelaskan serta mendeskripsikan masing-masing proporsi variabel yang diteliti dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.<sup>11</sup> Lalu dilakukan analisis bivariat, analisa ini dilakukan untuk menguji hipotesa hubungan 2 variabel yang diduga mempunyai hubungan dan korelasi. Analisa ini membuktikan ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Uji yang digunakan adalah *Chi-Square*. Melalui uji statistik ini, maka akan diperoleh nilai p dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Penelitian antara dua variabel akan dikatakan bermakna apabila mempunyai nilai  $p \leq 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima. Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk naratif dan tabel.<sup>12</sup>

## Hasil

### Karakteristik Responden

Berikut distribusi frekuensi responden dalam penelitian ini yang dilihat dari rata-rata umur responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor.

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

No	Data	Jenis	Frekuensi (F)	Presentase (%)
1	Umur Responden	< 25 Tahun	32	24,2
		25-40 Tahun	59	44,7
		> 40 Tahun	41	31,1
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	58	43,9
		Perempuan	74	56,1
3	Pendidikan Terakhir	SD	22	16,7
		SMP	35	26,5
		SMA	57	43,2
		Perguruan Tinggi	18	13,6
4	Pekerjaan	Tidak Bekerja / IRT	53	40,2
		Wirausaha	41	31,1
		Swasta	14	10,6
		Lainnya	24	18,2
Total			132	100

Sumber: (Data Primer, 2021)

Dari karakteristik responden diperoleh hasil bahwa dari 132 responden yang diteliti di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor diketahui mayoritas rata-rata umur adalah 25-40 tahun sebanyak 59 (44,7%) responden. Serta untuk jenis kelamin responden mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 74 (56,1%) responden. Dengan mayoritas pendidikan terakhir SMA sebanyak 57 (43,2%) responden. Sedangkan untuk mayoritas jenis pekerjaan responden adalah tidak bekerja atau Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 53 (40,2%) responden.

**Analisis Univariat**

Tujuan dari analisis univariat adalah untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yang diteliti. Analisis ini dilakukan terhadap setiap variabel dari penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel.<sup>12</sup>

**Tabel 2.** Analisis Univariat

No	Variabel	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Kepatuhan Membayar Iuran JKN	Tidak Patuh	74	56,1
		Patuh	58	43,9
2	Persepsi Membayar Iuran JKN	Negatif	86	65,2
		Positif	46	34,8
3	Pendapatan	Kurang	69	52,3
		Baik	63	47,7
4	Jarak ke Tempat Membayar Iuran JKN	Belum Terjangkau	80	60,6
		Terjangkau	52	39,4

Sumber: (Data Primer, 2021)

Berdasarkan tabel 2 dari 132 responden yang diteliti di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor diketahui sebanyak 74 responden atau (56,1%) tidak patuh dalam membayar iuran JKN, sedangkan sebanyak 58 responden atau (43,9%) patuh dalam membayar iuran JKN. Serta diketahui juga sebanyak 86 responden atau (65,2%) memiliki persepsi negatif dalam membayar iuran JKN, sedangkan sebanyak 46 responden atau (34,8%) memiliki persepsi positif dalam membayar iuran JKN. Serta diketahui juga sebanyak 69 responden atau (52,3%) memiliki pendapatan kurang, sedangkan sebanyak 63 responden atau (47,7%) memiliki pendapatan baik. Dan diketahui juga sebanyak 80 responden atau (60,6%) memiliki jarak yang belum terjangkau ke tempat membayar iuran JKN, sedangkan sebanyak 52 responden atau (39,4%) memiliki jarak yang terjangkau ke tempat membayar iuran JKN.

### Analisis Bivariat

**Tabel 3.** Analisis Bivariat

No	Variabel	Kepatuhan Membayar Iuran JKN				Total		P-Value	Odds Ratio
		Tidak Patuh		Patuh		N	%		
		n	%	n	%				
1	Persepsi								
	Negatif	57	66,3	29	33,7	86	100	0,002	3,353
	Positif	17	37,0	29	63,0	46	100		
2	Pendapatan								
	Kurang	47	68,1	22	31,9	69	100	0,006	2,848
	Baik	27	42,9	36	57,1	63	100		
3	Jarak Tempuh								
	Belum Terjangkau	52	65,0	28	35,0	80	100	0,017	2,532
	Terjangkau	22	42,3	30	57,7	52	100		

Sumber: (Data Primer, 2021)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021, diketahui dari 86 Responden yang memiliki persepsi negatif dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang tidak patuh sebanyak 57 atau (66,3%) responden. Dan dari 46 responden yang memiliki persepsi positif dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang patuh sebanyak 29 atau (63,0%) responden. Berdasarkan uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh  $p\text{-value} = 0,002$  lebih kecil dari 0,05 ( $p\text{-value} < 0,05$ ) yang artinya terdapat hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Hasil analisis lebih lanjut didapatkan nilai *Odds Ratio* (OR) = 3,353 yang artinya responden yang memiliki persepsi negatif berpeluang untuk berkontribusi 3,353 kali terhadap kepatuhan membayar iuran JKN dengan tidak patuh dibandingkan dengan responden yang memiliki persepsi positif.

Berdasarkan tabel 3 menunjukan hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021, diketahui dari 69 Responden yang memiliki pendapatan kurang dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang tidak patuh sebanyak 47 atau (68,1%) responden. Dan dari 63 responden yang memiliki pendapatan baik dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang patuh sebanyak 36 atau (57,1%) responden. Berdasarkan uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh  $p\text{-value} = 0,006$  lebih kecil dari 0,05 ( $p\text{-value} < 0,05$ ) yang artinya terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor 2021. Hasil analisis lebih lanjut didapatkan nilai *Odds Ratio* (OR) = 2,848 yang artinya responden yang memiliki pendapatan kurang berpeluang untuk berkontribusi 2,848 kali terhadap kepatuhan membayar iuran JKN dengan tidak patuh dibandingkan dengan responden yang memiliki pendapatan baik.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hubungan antara jarak tempuh ke lokasi pembayaran iuran dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021, diketahui dari 80 Responden yang memiliki jarak tempuh yang belum terjangkau dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang tidak patuh sebanyak 52 atau (65,0%) responden. Dan dari 52 responden yang memiliki jarak tempuh terjangkau dengan kepatuhan membayar iuran JKN yang patuh sebanyak 30 atau (57,7%) responden. Berdasarkan uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* = 0,017 lebih kecil dari 0,05 (*p-value* < 0,05) yang artinya terdapat hubungan antara jarak tempuh dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor 2021. Hasil analisis lebih lanjut didapatkan nilai *Odds Ratio* (OR) = 2,532 yang artinya responden yang memiliki jarak tempuh belum terjangkau berpeluang untuk berkontribusi 2,532 kali terhadap kepatuhan membayar iuran JKN dengan tidak patuh dibandingkan dengan responden yang memiliki jarak tempuh yang terjangkau.

## Pembahasan

### Hubungan Persepsi Dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN

Dari hasil analisis diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran JKN segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021. Sejalan dengan teori Anderson (1975) Persepsi adalah bagian dari penilaian individu yang merupakan karakteristik kebutuhan yang memungkinkan untuk mencari pengobatan yang dapat terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai kebutuhan. Dengan kata lain kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia (2018), berdasarkan hasil analisis menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai *p* = 0,001 (*p* < 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan persepsidengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar.<sup>14</sup> Begitupun dengan penelitian Wardani (2018) yang menunjukkan bahwa persepsi mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri.<sup>15</sup> Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang dilihat dari hasil uji *Chi-Square* menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri.<sup>8</sup>

Peneliti berasumsi bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur. Pengalaman pertama yang tidak menyenangkan pada pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi seorang terhadap kebutuhan untuk memperpanjang masa kepesertaannya serta keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebaliknya bagi peserta asuransi kesehatan yang memiliki persepsi positif terhadap tempat pelayanan kesehatan akan meningkatkan keteraturannya dalam membayar iuran asuransi kesehatan karena peserta telah mendapatkan pelayanan serta pengalaman yang baik saat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga akan meningkatkan kesinambungan kepesertaan dana sehat tersebut.

Guna mengubah persepsi masyarakat menjadi positif supaya meningkatnya kepatuhan dalam membayar iuran, Harapan Rumah Sakit X Kabupaten Bogor diharapkan melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Bogor untuk melakukan evaluasi mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Evaluasi tersebut harus yang bersumberkan dari lapangan secara langsung baik tentang tarif iuran, tatacara pendaftaran, tatacara pembayaran, keanggotaan kepesertaan, mutu pelayanan maupun kemauan ataupun kemampuan membayar masyarakat, guna terciptanya mutu pelayanan yang baik di lingkungan BPJS serta pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit X Kabupaten Bogor.

### **Hubungan Pendapatan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN**

Dari hasil analisis diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021. Sejalan dengan teori oleh Thabrany (2016), mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berasuransi semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2018) dengan hasil analisis p-value 0,017 artinya terdapat hubungan antara pendapatan dengan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mandala Kecamatan Medan.<sup>17</sup> Begitupun penelitian Sishaloho (2017), terdapat hubungan antara pendapatan dengan kemauan membayar responden dengan nilai p 0,018 lebih kecil dari 0,05, yang pada alpha 5% dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan.<sup>7</sup> Sejalan juga dengan Murti (2017), yaitu peningkatan pendapatan keluarga meningkatkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*) iuran.<sup>18</sup>

Peneliti berasumsi bahwa pendapatan memegang peranan penting dalam menentukan kemauan membayar iuran JKN peserta mandiri yang disebabkan oleh kesadaran yang dimiliki mereka. Pendapatan yang rendah dapat menurunkan kesadaran seseorang dalam berkemauan membayar, dengan beberapa alasan responden bahwa kebutuhan kehidupan sehari-hari yang menjadi prioritas saja masih sulit apalagi untuk membayar iuran jaminan kesehatan yang padahal mereka belum membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun faktor lain yang membuat tidak tercukupinya pendapatan dalam pembayaran iuran adalah karena adanya kenaikan iuran, sehingga agar dapat tetap dapat menerima pelayanan kesehatan dan upaya dalam patuhnya membayar iuran masyarakat banyak yang merubah kelas BPJS, dari yang tadinya kelas 1 pindah ke kelas 2, ataupun ke kelas 3, guna tercukupinya pendapatan dalam membayar iuran.

Agar pendapat masyarakat bisa mencukupi untuk iuran JKN dan tidak merasa terlalu dibebani, diharapkan Rumah Sakit X Kabupaten Bogor dan BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dapat bekerjasama untuk mendata kembali dan membantu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) JKN yang tidak mampu dalam membayar iuran agar disarankan merubah kepesertaanya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang tentunya kepesertaanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Hubungan Jarak Tempuh Ke Tempat Pembayaran Iuran JKN Dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN**

Dari hasil analisis diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan antara jarak tempuh ketempat pembayaran iuran JKN dengan kepatuhan membayar iuran JKN segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) di Rumah Sakit X Kabupaten Bogor tahun 2021. Sejalan dengan pendapat dari Mundiharno (2018) menjelaskan bahwa Jarak tempuh menuju tempat pembayaran iuran memiliki hubungan dengan keteraturan pembayaran iuran dana sehat, bagi peserta yang memiliki jarak tempuh dekat dengan tempat pembayaran iuran maka akan meningkatkan keteraturan peserta dana sehat dalam membayar iuran serta meningkatkan kesinambungan kepesertaan dana sehat, begitu pula sebaliknya bagi peserta yang memiliki jarak tempuh jauh dengan tempat pembayaran iuran maka akan menurunkan keteraturan peserta dana sehat dalam membayar iuran.<sup>19</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jarak tempuh ke tempat pembayaran iuran dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri.<sup>20</sup> Begitupun penelitian Pratiwi (2018) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu jarak ke tempat pelayanan di Rumah Sakit dr. Soebandi Kabupaten Jember.<sup>8</sup> Dan juga penelitian dari Husni (2019) berdasarkan keadaan di lapangan masalah kepatuhan masyarakat dalam membayar premi BPJS Kesehatan di Kota Padang ternyata masih belum disiplin salah satunya disebabkan oleh jarak menuju tempat pembayaran.<sup>21</sup>

Peneliti berasumsi bahwa jarak tempuh ketempat pembayaran memiliki peran penting dalam kemauan seseorang untuk patuh dalam pembayaran iuran JKN, walaupun BPJS sudah bekerjasama dengan tempat pembayaran langsung ataupun online tapi tetap saja masih ada yang membayar secara langsung dikarenakan ketidaktahuan peserta akan teknologi dan rata-rata umur peserta sudah diatas 40 tahun, sehingga jarak memiliki peran penting untuk seseorang mau membayar iuran secara tepat waktu setiap bulanya, agar supaya jarak tidak menjadi halangan bagi peserta yang ingin membayar iuran, perlu adanya penyuluhan supaya masyarakat tahu kalau pembayaran BPJS bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke tempat pembayaran langsung.

Untuk mengatasi jarak tempuh yang menjadi alasan peserta dalam kepatuhan pembayaran iuran JKN, Rumah Sakit diharapkan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan kemampuan peserta yang kurang paham tentang pemanfaatan teknologi pembayaran secara online dan peserta yang sudah berumur dalam melakukan pembayaran iuran secara online tanpa perlu datang langsung, dan juga Rumah Sakit menyediakan mengembangkan upaya untuk memberikan pemberitahuan pembayaran iuran kepada peserta seperti melalui media, misalnya melalui SMS atau WhatsApp.

### **Makna Singkatan (Abbreviations)**

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
NHI	: National Health Insurance
NWRP	: Non-Wage Recipient Participant
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah

### **Konflik Kepentingan**

Penelitian ini independen dari konflik kepentingan individu dan organisasi.

### **Pendanaan**

Sumber dana dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendanaan pribadi.

### **Kontribusi Penulis**

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Aisah sebagai author.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

### **References**

1. Perpres No 82. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: 2018.
2. Fildzah S. Willingness to Pay Fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Banda Aceh. Universitas Syah Kuala; 2016.
3. BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan tahun 2019 Data Kepesertaan Nasional. BPJS Kesehatan; 2019.
4. Perpres No 12. Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta: Perpres: 2013.
5. Aryani. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Willingness to Pay (WTP) Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Di Yogyakarta Menggunakan Contingent Variable Method (CVM). Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2018.

6. Damayanti R. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Pasien Membayar Biaya Rawat Inap Kelas III RSUD Muhammadiyah Kudus. Universitas Diponegoro: 2018.
7. Sihaloho E. Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro: 2017.
8. Pratiwi N. Faktor Yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Peserta Mandiri. [Jember]: Universitas Jember: 2018.
9. Dong H., Bocar K., John C., Rainer S. Differential Willingness of Household Heads to Pay Community-Based Health Insurance Premia for Themselves and Other Household Members. Academy for Clinical Excellence: 2017.
10. BPJS Kesehatan. Data Updating Program JKN-KIS Kedeputan Wilayah Jawa Barat Tahun 2020. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan: 2020.
11. Nursalam. Konsep Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika: 2017.
12. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta: 2016.
13. Anderson. Behavioral Model of Health Service Utilization. Cambridge: Ballinger; 1975.
14. Novia W. Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri Pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. [Makassar]: Universitas Hasanuddin: 2018.
15. Wardani. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Layanan Rawat Inap Lanjutan Peserta BPJS Kesehatan. JURNAL EDU Nursing: 2018.
16. Thabrany H. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2016.
17. Anita M. Determinan Kemauan Membayar Iuran (Willingness to Pay) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Kecamatan Medan. [Medan]: 2018.
18. Murti B. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan. Yogyakarta: Kanisius: 2017.
19. Mundiharno. Tinjauan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jakarta: Dewan JKN: 2018.
20. Wulandari A. Faktor-Faktor Mandiri yang Mempengaruhi Iuran Kepatuhan Program Peserta Jaminan Dalam Pembayaran Kesehatan Nasional di Kota Solok. J KESMAS: 2020.
21. Husni A. Kepatuhan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Mandiri Dalam Membayar Premi Di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Masyarakat Univ Andalas: 2019.

\*) Original Article

---ISJMHS---